

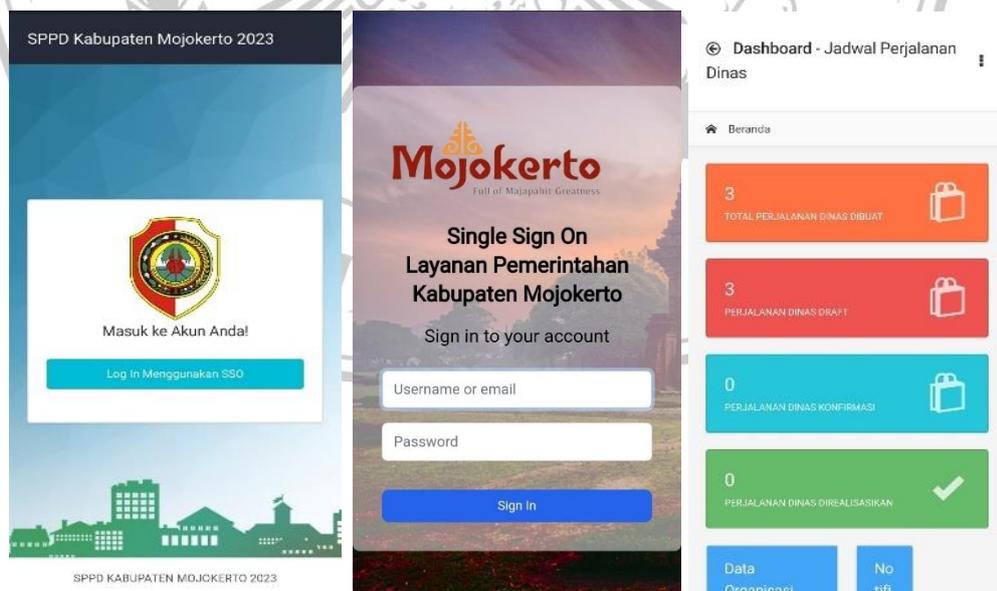
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengajuan Implementasi Inovasi pada program Elektronik Surat Perintah Perjalanan Dinas (e-SPPD) di Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

1. Desain dan Perancangan Sistem Aplikasi Elektronik Surat Perintah Perjalanan Dinas (e-SPPD)

Aplikasi e-SPPD (Elektronik Surat Perintah Perjalanan Dinas) adalah sebuah perangkat lunak atau aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola proses perjalanan dinas di suatu instansi atau organisasi secara elektronik. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam proses perjalanan dinas, mengurangi birokrasi, serta memudahkan pengguna untuk mengajukan, menyetujui, dan melacak perjalanan dinas. Berikut ini ketiga tampilan inti tersebut. Hal ini dapat kita lihat pada gambar berikut



gambar 4. 1 Tampilan Awal Aplikasi e-SPPD dan Tampilan beranda

Sumber: <https://e-sppd.mojokertokab.go.id/sppdv3/mojokertoku/perdin>

Tampilan cover awal mencantumkan nama singkat dari aplikasi e-SPPD Kabupaten Mojokerto untuk memberi pengguna informasi tentang aplikasi yang sedang digunakan. Halaman cover awal menampilkan logo khusus aplikasi e-SPPD berupa logo Kabupaten Mojokerto. Logo ini membantu mengidentifikasi aplikasi secara visual dan membedakannya dari aplikasi lain. Tampilan cover awal dilengkapi dengan gambar yang relevan dengan konteks aplikasi e-SPPD. Gambar ini dapat memberikan gambaran tentang perjalanan dinas atau elemen terkait lainnya. Tampilan cover awal sering kali menyediakan tombol masuk (login) yang memungkinkan pengguna untuk mengakses akun mereka. Pengguna perlu memasukkan kredensial (seperti username dan password) sebelum dapat menggunakan aplikasi.

Tampilan beranda (atau dashboard utama) dalam aplikasi e-SPPD adalah halaman pertama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil masuk atau membuka aplikasi. Ini adalah tampilan awal yang memberikan ringkasan tentang status dan informasi penting terkait proses perjalanan dinas yang sedang berlangsung atau telah dilakukan. Tampilan beranda biasanya dirancang untuk memberikan gambaran singkat dan mudah dipahami bagi pengguna.

1. Kesiapan Infrastruktur Penunjang Aplikasi E-SPPD

Kesiapan infrastruktur penunjang aplikasi E-SPPD (Elektronik Surat Perintah Perjalanan Dinas) di Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto mencakup persiapan segala hal yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi tersebut secara efektif. Ini mencakup aspek teknis dan non-teknis yang harus dipersiapkan untuk mendukung implementasi aplikasi E-SPPD. Infrastruktur ini adalah fondasi penting dalam penggunaan aplikasi E-SPPD. Koneksi internet yang cepat dan andal diperlukan untuk mengakses dan menggunakan aplikasi ini secara online. Koneksi yang stabil memastikan bahwa pengguna dapat mengajukan dan memproses SPPD tanpa gangguan.

Aplikasi E-SPPD mungkin memerlukan server dan infrastruktur

hosting yang memadai untuk menjalankan aplikasi tersebut. Server yang kuat dan aman diperlukan untuk menyimpan data SPPD yang sensitif dan menjaga ketersediaan aplikasi. Kesiapan dalam hal keamanan informasi sangat penting. Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto harus memastikan bahwa data pribadi dan sensitif yang terkait dengan SPPD dijaga dengan baik dan tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Pegawai yang akan menggunakan aplikasi E-SPPD memerlukan perangkat keras seperti komputer atau tablet yang memadai. Pastikan bahwa perangkat keras yang digunakan mendukung aplikasi ini dan dapat menjalankannya dengan lancar. Kesiapan infrastruktur juga melibatkan pelatihan pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tentang cara menggunakan aplikasi E-SPPD. Pelatihan ini diperlukan agar pegawai dapat dengan lancar mengajukan dan memproses SPPD secara elektronik. Perlu ada tim atau sumber daya yang siap memberikan dukungan teknis jika ada masalah atau kendala dalam penggunaan aplikasi E-SPPD. Ini termasuk perbaikan teknis, pembaruan perangkat lunak, dan bantuan teknis lainnya.



gambar 4. 2 Infrastruktur Komputer Operasional E-SPPD

Sumber: Dokumentasi Peneliti

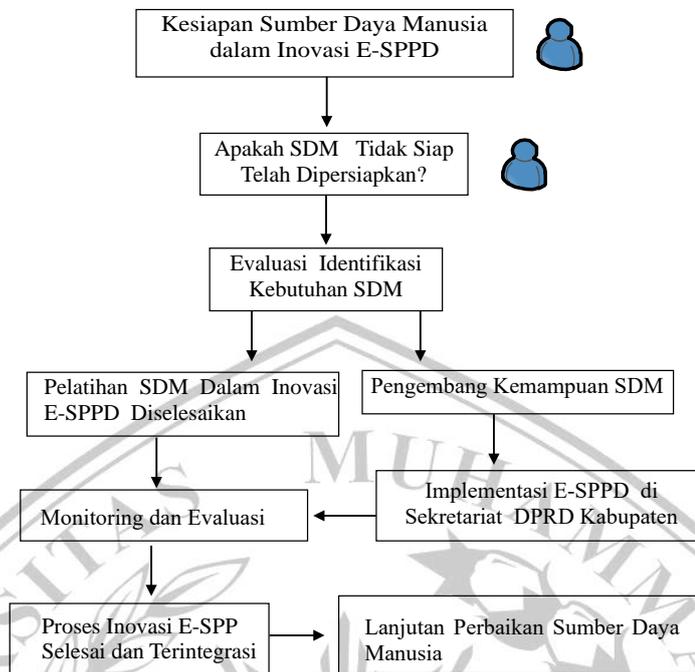
Infrastruktur penunjang harus memiliki sistem cadangan yang

dapat mengatasi kegagalan perangkat keras atau masalah lainnya. Backup data SPPD harus diatur dengan baik agar data tidak hilang. Setelah implementasi, penting untuk memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang memungkinkan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto untuk melacak penggunaan aplikasi E-SPPD, mengidentifikasi masalah, dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan.

2. Kesiapan Sumber Daya Manusia (Aparatur)

Kesiapan sumber daya manusia (SDM) atau aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto merujuk pada ketersediaan dan kesiapan pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang bekerja di Sekretariat DPRD untuk mendukung dan mengelola tugas-tugas yang terkait dengan administrasi, legislasi, dan fungsi lainnya di tingkat kabupaten. Dalam prosesnya mencakup pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugas mereka. Pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tugas-tugas mereka, termasuk pemahaman tentang regulasi pemerintah, prosedur administrasi, serta kemampuan teknis yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi dan teknologi terkait.

Untuk menjaga kesiapan SDM, pelatihan dan pengembangan pegawai sangat penting. Ini termasuk pelatihan terkait dengan aplikasi E-SPPD dan teknologi lainnya yang digunakan dalam operasi harian. Pelatihan ini memungkinkan pegawai untuk terus mengembangkan keterampilan mereka sesuai dengan perubahan kebutuhan organisasi. Kesiapan SDM juga mencakup kesesuaian jumlah dan jenis personel dengan tugas-tugas yang ada. Pastikan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto memiliki jumlah dan jenis pegawai yang cukup untuk menjalankan operasional dengan baik. Kedisiplinan dan etika kerja yang baik adalah unsur penting dalam kesiapan SDM. Pegawai diharapkan untuk mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.



gambar 4. 3 diagram alir Program E-SPPD

Sumber: catatan penulis

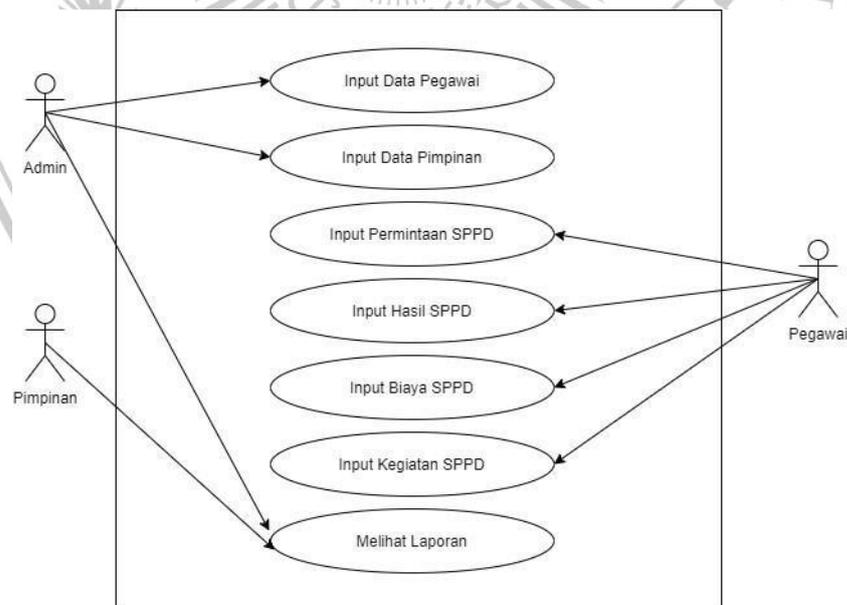
Kesiapan SDM juga mencakup kemampuan pegawai untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja, termasuk perubahan teknologi dan prosedur administrasi. Pegawai harus siap untuk menghadapi perubahan dan belajar hal baru. Khususnya dalam konteks pemerintahan daerah, pengalaman dan pengetahuan tentang situasi lokal dan kebijakan daerah sangat berharga. Pegawai yang memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi dan kebijakan Kabupaten Mojokerto dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka. Kemampuan untuk bekerja dalam tim dan berkolaborasi dengan baik dengan sesama pegawai sangat penting dalam mengelola tugas-tugas di Sekretariat DPRD. Kesejahteraan pegawai juga merupakan faktor penting dalam kesiapan SDM. Pastikan bahwa pegawai memiliki kondisi kerja yang mendukung dan merasa dihargai.

3. Respon ASN Sebagai User dari Aplikasi E-SPPD

Respon ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagai pengguna dari aplikasi E-SPPD (Elektronik Surat Perintah Perjalanan Dinas) di

Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto mencakup sikap, tindakan, dan interaksi pegawai dengan aplikasi tersebut. Respon ASN mencakup penggunaan aktif aplikasi E-SPPD dalam tugas-tugas mereka terkait perjalanan dinas. Mereka harus mengakses, mengisi, dan mengirimkan permintaan perjalanan dinas melalui aplikasi ini. ASN diharapkan untuk menggunakan aplikasi E-SPPD dengan tertib sesuai dengan regulasi dan prosedur yang berlaku. Mereka harus mematuhi pedoman dan aturan yang ditetapkan dalam penggunaan aplikasi ini.

Respon ASN juga mencakup kemampuan untuk mengisi data dengan akurat dan lengkap. Informasi yang dimasukkan harus benar dan sesuai dengan kebutuhan administrasi serta berbagai persyaratan perjalanan dinas. Setelah mengajukan permintaan perjalanan dinas, pegawai diharapkan untuk mengikuti proses persetujuan yang telah ditetapkan dalam aplikasi E-SPPD. Mereka harus bersedia menunggu persetujuan dari atasan atau pihak yang berwenang sebelum melakukan perjalanan. ASN harus mengikuti jadwal perjalanan dinas yang telah disetujui dan mematuhi anggaran yang telah dialokasikan. Ini mencakup pemesanan tiket, akomodasi, dan penggunaan dana dengan tepat.



gambar 4. 4 usecase

sumber: Catatan Penulis

Pegawai diharapkan untuk secara aktif memantau status pengajuan perjalanan dinas mereka melalui aplikasi E-SPPD. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengetahui perkembangan dan keputusan terkait perjalanan dinas. Respon ASN juga mencakup kerjasama dengan tim teknis yang bertanggung jawab atas aplikasi E-SPPD. Jika ada masalah atau kendala teknis, ASN diharapkan untuk melaporkannya dan berpartisipasi dalam pemecahan masalah.

ASN dapat memberikan umpan balik konstruktif terkait dengan pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi E-SPPD. Umpan balik ini dapat digunakan untuk perbaikan aplikasi dan proses administratif secara keseluruhan. Respon ASN juga mencakup ketaatan terhadap etika dan aturan yang berlaku dalam penggunaan aplikasi E-SPPD. Ini mencakup perlindungan data sensitif, penggunaan yang sah, dan tindakan yang etis. Berikut ini rincian Tabel Indikator Evaluasi, Target, Hasil, dan Mekanisme aplikasi e-SPPD:

Tabel 4. 1 Tabel Indikator Evaluasi, Target, Hasil, dan Mekanisme

No.	Indikator Evaluasi	Target Tahun Ini	Hasil Tahun Ini	Mekanisme
1.	Rata-rata waktu pengajuan SPPD melalui E-SPPD	Maksimal 3 hari	2 hari	Pengukuran rata-rata waktu dari permohonan hingga persetujuan SPPD menggunakan data E-SPPD.
2.	Tingkat aksesibilitas informasi perjalanan dinas	100%	99%	Evaluasi terhadap tingkat ketersediaan informasi perjalanan dinas yang dapat diakses oleh pihak terkait melalui sistem.

3.	Tingkat kesalahan dalam laporan perjalanan dinas	Maksimal 5%	3%	Verifikasi dan validasi data laporan perjalanan dinas dengan data yang tercatat dalam sistem E-SPPD.
4.	Tingkat kepatuhan terhadap peraturan E-SPPD	100%	98%	Audit internal dan pemeriksaan atas penggunaan E-SPPD untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Suber : <https://setwan.mojokertokab.go.id/>

Berdasarkan data di atas, dapat kita lihat bahwa Rata-rata waktu pengajuan SPPD melalui E-SPPD pada tahun ini berhasil mencapai hasil yang baik, yaitu hanya memerlukan waktu 2 hari. Hasil ini memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu maksimal 3 hari, menunjukkan bahwa proses pengajuan SPPD menggunakan E-SPPD berjalan dengan efisien dan cepat. Tingkat aksesibilitas 100%, yang berarti seluruh informasi perjalanan dinas yang terkait harus dapat diakses oleh pihak terkait melalui sistem E-SPPD. Hasil evaluasi tahun ini menunjukkan bahwa tingkat aksesibilitas informasi perjalanan dinas mencapai 99%. Meskipun angka ini sangat mendekati target yang ditetapkan, ada sedikit ruang untuk perbaikan guna mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat aksesibilitas, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan atau penyesuaian untuk meningkatkan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh pihak terkait. Meskipun tingkat aksesibilitas 99% menunjukkan bahwa mayoritas informasi perjalanan dinas sudah dapat diakses melalui sistem E-SPPD, evaluasi ini memberikan informasi

penting bagi perbaikan ke depan. Pihak yang terlibat dalam pengelolaan E-SPPD dapat menggunakan hasil evaluasi ini untuk melakukan analisis mendalam terhadap kendala yang mempengaruhi tingkat aksesibilitas dan mengimplementasikan tindakan perbaikan yang tepat.

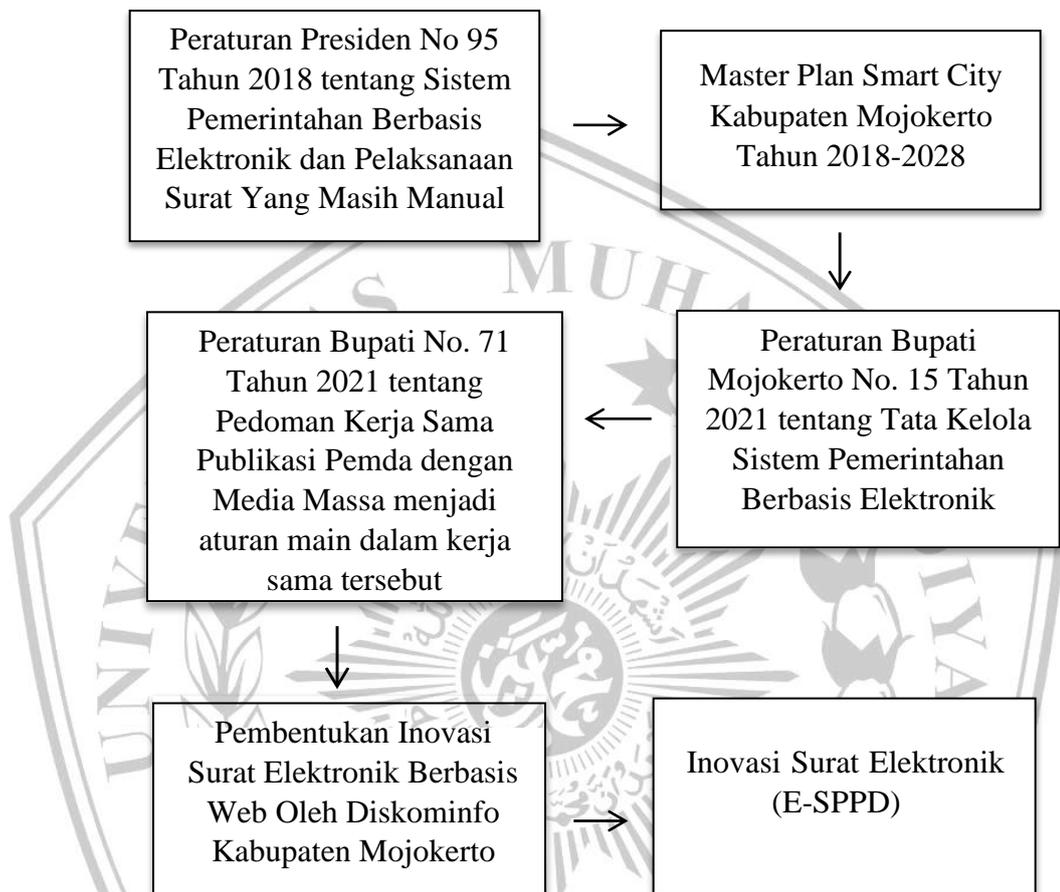
Tingkat kesalahan dalam laporan perjalanan dinas telah ditetapkan maksimal 5% dalam kebijakan penerapan E-SPPD di Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto. Evaluasi tahun ini menunjukkan bahwa tingkat kesalahan yang terjadi dalam laporan perjalanan dinas mencapai 3%, yang berarti berada di bawah batas maksimal yang telah ditetapkan. Tingkat kesalahan sebesar 3% menunjukkan bahwa data laporan perjalanan dinas yang dihasilkan oleh aplikasi E-SPPD cenderung akurat dan memiliki tingkat kebenaran yang tinggi. Proses verifikasi dan validasi data laporan perjalanan dinas menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan akurasi dan keandalan data yang tercatat dalam sistem E-SPPD. Tim pengelola E-SPPD dan pihak berwenang di Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan validasi secara berkala terhadap data laporan perjalanan dinas yang telah diinputkan ke dalam sistem.

Dalam proses verifikasi, data laporan perjalanan dinas akan diperiksa dan dicek ulang untuk memastikan bahwa data tersebut telah diisi dengan benar, lengkap, dan sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung yang ada. Setiap kesalahan atau ketidaksesuaian akan diidentifikasi dan dicatat untuk langkah perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya, dalam proses validasi, data laporan perjalanan dinas yang telah diverifikasi akan diuji dan dibandingkan dengan data yang tercatat dalam sistem E-SPPD. Tujuan dari validasi ini adalah untuk memastikan bahwa data yang diinputkan dalam aplikasi E-SPPD telah terekam dengan benar dan sesuai dengan kejadian sebenarnya saat perjalanan dinas dilakukan.

Tingkat kepatuhan terhadap peraturan E-SPPD pada tahun ini mencapai 98%. Meskipun sangat mendekati target 100%, ada ruang untuk

perbaikan agar mencapai tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Audit dan pemeriksaan internal telah membantu memantau kepatuhan pengguna terhadap peraturan yang berlaku dalam penggunaan E-SPPD.

Tabel 4. 2 Proses Pembentukan Sistem Penerapan E-SPPD



Sumber : Analisis Penulis

Berdasarkan langkah prosedur diatas bahwasannya e-SPPD secara sah diakui oleh legalitas dari pemerintah melalui Peraturan Bupati Mojokerto No 15 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Peraturan Bupati No 71 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Pemda dengan Media Massa menjadi aturan main dalam kerja sama yang menghasilkan terbentuknya sistem penerapan e-SPPD.

4. Pelibatan Stakeholders Dalam Penerapan Aplikasi e-SPPD

Pelibatan stakeholders dalam penerapan aplikasi E-SPPD

(Elektronik Surat Perintah Perjalanan Dinas) di Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah proses melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan atau peran terkait dengan pengembangan, penggunaan, dan manajemen aplikasi E-SPPD. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan semua pihak yang terlibat. Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah pengguna utama aplikasi E-SPPD, sehingga penting untuk mendengarkan masukan dan pemahaman mereka tentang kebutuhan sehari-hari dalam menggunakan sistem ini.

Para anggota DPRD perlu diberikan pemahaman tentang bagaimana aplikasi ini dapat membantu mereka dalam mengajukan dan memonitor perjalanan dinas serta pengelolaan anggaran yang terkait. Tim pengembang aplikasi yang bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara aplikasi E-SPPD harus terlibat aktif dalam berkomunikasi dengan stakeholders lainnya untuk memahami kebutuhan teknis dan fungsional. bendahara Keuangan mungkin terlibat dalam proses pelaporan keuangan terkait perjalanan dinas. Oleh karena itu, mereka perlu dilibatkan dalam pengembangan aplikasi E-SPPD untuk memastikan integritas dan kepatuhan data keuangan.

Jika ada vendor atau kontraktor yang terlibat dalam pengembangan aplikasi E-SPPD, mereka juga harus dilibatkan dalam proses pelibatan stakeholders untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan kontrak dan spesifikasi teknis. Selain pegawai sekretariat DPRD dan anggota DPRD, ada kemungkinan ada pihak lain yang terlibat dalam proses perjalanan dinas, seperti petugas administrasi atau auditor. Mereka juga perlu dilibatkan dalam proses pengembangan dan pelatihan terkait aplikasi ini.

B. Faktor penghambat dalam Implementasi Inovasi Program Elektronik Surat Perintah Perjalanan Dinas (e-SPPD) di Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

1. Latarbelakang Pendidikan ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto lebih sedikit dibandingkan bidang TI

ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto mungkin memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih rendah secara umum dibandingkan dengan mereka yang bekerja di bidang TI. Misalnya, mayoritas ASN memiliki latar belakang pendidikan formal di tingkat sarjana, sementara bidang TI mungkin memiliki persentase yang lebih tinggi dengan gelar sarjana atau bahkan lebih tinggi. ASN mungkin lebih berfokus pada latar belakang pendidikan yang terkait dengan administrasi, hukum, atau bidang lain yang tidak secara langsung terkait dengan teknologi informasi. Sebaliknya, di bidang TI, latar belakang pendidikan lebih cenderung terkait dengan komputer, teknologi, dan ilmu komputer.

Teknologi informasi adalah bidang yang berkembang pesat, dan pelaku di dalamnya perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terus diperbarui. ASN yang tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang TI mungkin kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memahami aplikasinya. Tugas dan tanggung jawab ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto mungkin berbeda secara signifikan dengan mereka yang bekerja di bidang TI. Ini dapat mencakup administrasi, legislatif, atau tugas-tugas terkait pemerintahan lokal, sementara bidang TI lebih terkait dengan pengembangan perangkat lunak, manajemen jaringan, dan dukungan teknis.

Tabel 4. 3 Daftar Pendidikan Terakhir ASN di BKD Provinsi Jawa Timur yang berlatar belakang pendidikan TI

No.	Nama	Jenjang	Nama Universitas	Prodi
1.	M.RIZA	S1	Universitas	Sarjana

	MUZAKKI, ST.		Brawijaya	Teknologi Informasi
2.	SUGINO	S1	Universitas Pembangunan Veteran Jatim	Sarjana Teknik Informatika
3.	DIDIN ISTIONO	S1	Universitas Islam Majapahit	Sarjana Manajemen Informatika
4.	KOKOK ROY	S1	Universitas Islam Majapahit	Sarjana Teknik Informatika

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto

Informasi yang disajikan di sini merupakan rangkuman statistik pendidikan terkini setiap pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto. Dari 70 pegawai tersebut, hanya 4 orang atau 4% yang mendapatkan pelatihan di bidang teknologi informasi Hal ini menjadi tantangan dalam penerapan aplikasi e-SPPD. Sebab, setiap departemen di bawah Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto mengurus pelayanan kepegawaian. menjadi operator aplikasi, dan tantangan yang sering muncul di lapangan adalah Program e-SPPD belum dikuasai oleh operator di masing-masing bidang.

2. Sangat Sedikit ASN Yang Memiliki Skill Komputer

Faktor pembahambat lainnya dalam inovasi penerapan e-SPPD di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto di mana hanya sedikit pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kemampuan atau keterampilan dalam penggunaan computer. ASN meliputi berbagai posisi dan bidang pekerjaan hal Ini mengacu pada kemampuan atau keterampilan pegawai dalam menggunakan komputer. Kemampuan ini dapat mencakup penggunaan perangkat lunak, perangkat keras, serta keterampilan dalam

mengoperasikan program-program komputer yang relevan dengan tugas-tugas mereka. Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto bagian dari pemerintahan daerah yang bertanggung jawab untuk mendukung kegiatan legislatif di tingkat kabupaten. Sekretariat DPRD berperan dalam menyediakan dukungan administratif, dokumentasi, dan komunikasi untuk anggota DPRD.

Sangat Sedikit hal Ini menunjukkan bahwa proporsi pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto yang memiliki kemampuan komputer sangat terbatas. Hal ini dapat menjadi masalah dalam menjalankan tugas-tugas yang memerlukan penggunaan teknologi informasi. Kondisi di mana hanya sedikit ASN yang memiliki kemampuan komputer di sebuah instansi pemerintah dapat menjadi tantangan serius dalam era digital saat ini. Kemampuan komputer yang kuat seringkali sangat penting untuk efisiensi operasional, pengolahan data, komunikasi, dan pelaksanaan tugas-tugas administratif lainnya. Oleh karena itu, mungkin perlu adanya pelatihan dan upskilling bagi ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto agar mereka dapat mengatasi kekurangan dalam hal ini dan meningkatkan produktivitas kerja mereka.